

Bidang Unggulan: Konflik dan Perdamaian
Kode/Nama Rumpun Ilmu: 593/Hubungan Internasional

LAPORAN MONEVIN
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
Pembuatan Aplikasi Software
Sebagai Piranti Deteksi Dini dan Dokumentasi
Konflik Horizontal di Propinsi DIY



Ketua
Dr. Sidik Jatmika, M.Si
NIDN.0503056901
Anggota
Dr. Surwandono, M.Si
NIDN. 0502057101

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
AGUSTUS, 2016

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pembuatan Aplikasi Software Sebagai Piranti Deteksi Dini dan Dokumentasi Konflik Horisontal di Propinsi DIY

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Dr. Drs SIDIK JATMIKA M.Si
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
NIDN : 0503056901
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Nomor HP : 081 827 9041
Alamat surel (e-mail) : sidikjatmika@yahoo.com

Anggota (1)

Nama Lengkap : SURWANDONO S.Sos, M.Si
NIDN : 0502057101
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Institusi Mitra (jika ada) : -
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 50.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp 277.000.000,00



Mengetahui,
Dekan FISIPOL
(Ali Muhammad, Ph.D)
NIP/NIK 197107312005011001

Yogyakarta, 7 - 9 - 2016
Ketua,

(Dr. Drs SIDIK JATMIKA M.Si)
NIP/NIK 163021

ABSTRAK

Tujuan akhir penelitian adalah membuat software penatalaksanaan deteksi dini untuk pengelolaan konflik horisontal di Yogyakarta melalui aktivitas; merancang simulasi teoretik tentang penyebab, pola eskalasi, dan pemicu terjadinya eskalasi konflik horisontal dalam framework *deteksi dini*, merancang software *Deteksi dini* Konflik Horisontal yang dapat digunakan untuk mendokumentasi, menganalisis dan merancang kebijakan untuk mengelola konflik horisontal di Indonesia secara efektif dan efisien, mensimulasikan software *Deteksi dini* Konflik Horisontal kepada stakeholder konflik horisontal secara terbatas dan mendesiminasikan software *Deteksi dini* Konflik Horisontal di Yogyakarta dalam konferensi internasional, menyusun buku dan mengurus paten.

Pengambilan lokasi penelitian di pulau Jawa terkait dengan banyaknya variasi konflik horisontal dari konflik horisontal berbasis ekonomi, social, politik, etnis, dan keagamaan. Untuk memperoleh obyektifikasi, penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif yakni melakukan kuantifikasi fenomena social untuk dibangun indeks guna penyusunan software *deteksi dini* konflik horisontal di Indonesia. Populasi penelitian adalah wilayah yang pernah terjadi konflik horisontal di Pulau Jawa, dengan mengambil sampel penelitian melalui metode *purposive random sampling*.

Pengumpulan data dilakukan dengan survay dan melakukan wawancara mendalam kepada pakar konflik horisontal maupun pengumpulan dokumen dari stakeholder konflik horisontal di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan analisis isi terhadap dokumen konflik yang dimiliki birokrasi maupun organisasi sipil. Untuk mendesiminasikan software deteksi dini konflik horisontal secara komprehensif maka akan dilakukan simulasi terbatas dan setelah mendapatkan masukan dari stakeholder konflik horisontal maka akan didesiminasikan ke public.

Key Words: Konflik Horisontal, Masyarakat Perkotaan , Indeks Konflik, Software Konflik Horisontal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik horizontal di Indonesia telah menjadi gejala yang mengkhawatirkan masyarakat Indonesia. Hal ini diawali dengan beberapa konflik horizontal yang kemudian berekskalasi secara massif menjadi konflik etnis, seperti yang terjadi di Ambon, Palu, Sampit, Aceh dan Papua, dan menggunakan instrument-intrumen kekerasan terhadap kelompok etnis yang lain. Merujuk studi yang dilakukan Lembaga Informasi Nasional, kekerasan dari konflik horizontal tersebut telah mengakibatkan lebih dari 2000 jiwa meninggal dunia dan diiringi dengan rusaknya harmoni social, politik dan ekonomi di daerah tersebut. Bahkan sebagai akibat dari banyaknya konflik horizontal di Indonesia, muncul istilah baru dalam diskursus ilmu social yakni “amoks”, untuk menyebut fenomena kekerasan yang diambil dari kosa kata dari bahasa Indonesia “amuk”.

Di samping konflik horizontal yang berbasis etnis yang terjadi di luar pulau Jawa, konflik horizontal yang berbasis masyarakat perkotaan juga muncul secara massif di pulau Jawa seperti fenomena tawuran antar pelajar, mahasiswa, antara komunitas warga masyarakat, antar profesi, bahkan konflik horizontal antar partai politik. Issue konflik horizontal di Pulau Jawa sangatlah beragam dan tumpang tindih, baik dari issue primordialis seperti konflik karena afiliasi keberagamaan, etnis, issue instrumentalistik seperti sengketa perebutan lahan, mobilisasi perebutan suara politik dalam pilkada, maupun issue konstruktivistik seperti konflik tentang kebijakan yang diskriminatif. Studi yang dilakukan oleh Setara Institute menggambarkan bahwa konflik horizontal di perkotaan cenderung meningkat terkait dengan semakin menurunnya budaya toleransi sebagai akibat dari semakin menurunnya kualitas kesejahteraan ekonomi masyarakat perkotaan.

Aktor yang terlibat dalam konflik horizontal dengan basis perkotaan di pulau Jawa juga sangat beragam. Masyarakat yang berhubungan dengan pendidikan seperti siswa, maupun mahasiswa, sekolah, masyarakat yang berhubungan dengan profesi seperti bentrokan antar tukang parker, buruh, masyarakat politik seperti konflik antar massa partai politik, ataupun konflik horizontal antar aparat keamanan, seperti bentrokan antar TNI maupun Polisi, bentrokan antara aparat keamanan dengan masyarakat.

I.2. Tujuan Khusus

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah tersusunnya software penatalaksanaan *deteksi dini* yang dapat digunakan untuk mendokumentasi, menganalisis dan merancang kebijakan untuk mengelola konflik horisontal di Indonesia secara efektif dan efisien. Aktivitas yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah;

1. Merancang simulasi teoretik tentang penyebab, pola eskalasi, dan pemicu terjadinya eskalasi konflik horizontal dalam framework *deteksi dini*,
2. Merancang software *Deteksi dini* konflik horisontal yang dapat digunakan untuk mendokumentasi, menganalisis dan merancang kebijakan untuk mengelola konflik horisontal di Indonesia secara efektif dan efisien.
3. Mensimulasikan software *deteksi dini* konflik horisontal kepada stakeholder konflik horizontal secara terbatas
4. Mendesiminasikan software deteksi dini konflik horisontal yang dapat digunakan untuk mendokumentasi, menganalisis dan merancang kebijakan untuk mengelola konflik horisontal pada konferensi internasional
5. Menyusun artikel, buku dan paten dari software deteksi dini konflik horisontal

I.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Urgensi penelitian tentang software penatalaksanaan *deteksi dini* yang dapat digunakan untuk mendokumentasi, menganalisis dan merancang kebijakan untuk mengelola konflik horisontal di propinsi DIY secara efektif dan efisien adalah sebagai berikut.

Pertama, meningkatnya frekuensi konflik horizontal di hampir semua lapisan masyarakat di DIY. Hal ini ditandai dengan intensifnya konflik horizontal di masyarakat terpelajar seperti fenomena tawuran, intensifnya konflik horizontal yang berbasis primordialisme, intensifnya konflik horizontal yang berbasis sengketa lahan dalam issue industry, bahkan konflik horizontal yang terkait dengan issue politik dalam pelaksanaan pilkada.

Kedua, dinamika konflik horizontal yang sering terjadi tersebut seringkali belum terdokumentasikan dalam system informasi indeks konflik secara sistematis. Informasi seputar kejadian konflik hanya menjadi berkas dokumen untuk kepentingan pemberkasan untuk kepentingan penegakan hokum dibandingkan menjadi instrument penting untuk

pencegahan konflik horizontal secara sistematis. Dalam studi resolusi konflik, pendokumentasian fakta-fakta konflik yang sistematis dapat dikelola untuk dijadikan referensi utama dalam pembuatan system peringatan dini.

Ketiga, belum tersedianya system informasi yang dapat dipergunakan oleh stakeholder konflik horizontal untuk melakukan pendokumentasian, menganalisis maupun merancang pengambilan keputusan baik yang berbasis kebijakan politik, social, ekonomi, budaya maupun keamanan untuk mencegah eskalasi konflik horizontal. Ketidakterseediaan system informasi yang berbasis *deteksi dini* dalam konflik horizontal telah menyebabkan berbagai kebijakan yang dilakukan untuk pencegahan konflik horizontal menjadi kurang efektif.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tentang penyusunan software penatalaksanaan *deteksi dini* yang dapat digunakan untuk mendokumentasi, menganalisis dan merancang kebijakan untuk mengelola konflik horizontal di DIY secara efektif dan efisien adalah sebagai berikut.

Pertama, mengurangi frekuensi konflik horizontal di DIY melalui pendayagunaan system informasi sebagai instrument untuk mendesain kebijakan pengelolaan konflik yang lebih rasional, sistematis dan komprehensif. Ketersediaan system informasi konflik horizontal yang komprehensif dapat dipergunakan oleh stakeholder konflik untuk merancang berbagai produk regulasi yang berbasis deteksi dini untuk mencegah terjadinya konflik horizontal.

Kedua, terdokumentasikannya fakta-fakta konflik horizontal secara sistematis, sehingga dapat dipergunakan untuk pengelolaan pembuatan system peringatan dini konflik horizontal secara efektif dan efisien.

Ketiga, tersedianya system informasi yang dapat dipergunakan oleh stakeholder konflik horizontal untuk melakukan pendokumentasian, menganalisis maupun merancang pengambilan keputusan baik yang berbasis kebijakan politik, social, ekonomi, budaya maupun keamanan untuk mencegah eskalasi konflik horizontal. Ketersediaan system informasi yang berbasis *deteksi dini* dalam konflik horizontal akan berkontribusi terhadap lahirnya kebijakan untuk pencegahan konflik horizontal yang efektif dan efisien.

BAB II

STUDI PUSTAKA

Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lain. Issue konflik yang seringkali dominan dalam konflik horizontal adalah issue perebutan distribusi sumberdaya ekonomi, politik, social budaya, keagamaan. Lembaga Informasi Nasional (LIN) selama 5 tahun (dari 2000-2005) melakukan penelitian terhadap konflik-konflik horizontal etnis di Indonesia, baik di Papua, Poso, Ambon, Aceh, Sampit-Dayak, maupun di Jawa Timur. Terdapat temuan yang menarik dari penelitian yang dilakukan oleh LIN bahwa konflik horizontal yang berbasis di daerah konflik sangat berhubungan erat dengan proses pemilihan kepala daerah.¹

Studi tentang eskalasi konflik telah dilakukan secara sistematis oleh Ted Gurr. Tesis utama Ted Gurr adalah kekerasan sosial muncul sebagai akibat terciptanya deprivasi relatif, yakni terdapatnya kesenjangan antara apa-apa yang diharapkan (*expectation*) dengan apa-apa yang diperoleh (*realities*). Semakin lebar jarak kesenjangan antara ekspektasi dengan apa-apa yang diperoleh akan semakin besar pula peluang terjadi konflik dan kekerasan.² Ted Gurr juga mengembangkan studi tentang *deteksi dini* dalam konflik, melalui intervensi fihak ketiga untuk mengurangi celah kesenjangan tersebut.³ Intervensi fihak ke 3 ini difahami sebagai kebijakan yang bersifat optional manakala eskalasi konflik sudah mencapai titik *stalmate*, di mana masing-masing fihak yang berkonflik sudah saling melukai dan menghancurkan fihak yang lain.

¹Lihat lebih jauh dalam *Dinamika Konflik dalam Transisi Demokrasi: Informasi Potensi Konflik dan Potensi Integrasi Bangsa (Nation and Character Building)*, Jakarta, Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Informasi Nasional, 2004

²Lihat tulisan Ted Robert Gurr, 1998, *Minorities at risk*. Washington, DC: U.S. Institute for Peace

³Lihat Ted Robert Gurr, 1998. *Early warning of ethnopolitical rebellion: In Preventive measures*, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, hal 35-47 atau dalam Gurr, Ted Robert, and Barbara Harff. 1996. *Early warning of communal conflict and genocide*. Tokyo: United Nations University Press dan Gurr, Ted Robert, and Mark Lichbach. 1986. *Forecasting internal conflict: A competitive evaluation of empirical theories*. Comparative Political Studies 19:3-38.

Tabel 1

Analisis Trigger dan Akselerator Konflik SARA di Yogyakarta

No	Peristiwa Konflik	Fihak Yang Berkonflik	Tahun	Trigger	Akselerator	Implikasi
1	Perang Sabil	Diponegoro dan Pemerintah Belanda	1825-1830	Ketersinggungan pribadi terkait tanah makam di Tegalrejo	Kebencian mendalam kepada kebijakan Belanda	Perang terbuka
2	Pembunuhan etnis Tionghoa	Keraton dan Etnis Tionghoa	1825	Chaos dari perang Sabil	Dendam dan frustrasi masa lalu terhadap sikap orang Tionghoa	Konflik terbuka
3	Konflik NU dan Muhammadiyah di Wonokromo	Warga NU dan Muhammadiyah	1960, 2002	Pilkades, perayaan hari raya	Fanatisme keagamaan dan hubungan mayoritas minoritas	Perdebatan pada level masyarakat sampai sabotase
4	Pembunuhan terhadap simpatisan PKI	Kelompok yang disinyalir komunis dan pemerintah militer	1965-1970	Kebijakan pemerintah untuk menertibkan kelompok social tertentu	Keterlibatan kelompok sipil yang memiliki dendam masa lalu	Konflik terbuka
5	Konflik HMI MPO dan DIPO	Kelompok HMI MPO dan DIPO	1985-1986	Penerapan kebijakan asas tunggal kepada ormas	Fanatisme tafsir politik keagamaan	Perdebatan sampai penyegelan
6	Konflik elit antara Muhammadiyah dan Kelompok Tarbiyah (pengajian PKS) di Piyungan	Muhammadiyah tingkat cabang (kecamatan) dan kelompok pengajian Tarbiyah	2008	Banyaknya aktivis muda Muhammadiyah yang eksodus ke Tarbiyah	Kebijakan penertiban organisasi oleh Muhammadiyah	Perdebatan dan segregasi hubungan
7	Penolakan pembangu-	Kelompok	2013	Pembangunan gereja di	Pengurusan ijin yang tidak	Perdebatan dan

	nan Gereja di Jagalan Berbah Sleman, di Trirenggo Bantul, Tirto Rajayu Galur Kulon Progo	Kristen dan Masyarakat Islam		komunitas Muslim	terbuka	boikot
8	Penyegelan kantor Jemaah Ahmadiyah	Front Umat Islam (FUI) dan JAI (Jemaah Ahmadiyah Indonesia)	2011	Peristiwa penyerangan Ahmadiyah di Cekeusik di Jawa Barat	Sentimen negative FUI terhadap aktivitas Ahmadiyah di Yogyakarta	Penyegelan kantor
9	Penggrebekan diskusi Irshad Manji di LKIS Banguntapan	Kelompok Islam liberal dan Majelis Mujahidin Indonesia	Mei 2012	Diskusi keagamaan kritis yang menyinggung posisi keagamaan Islam	Ketidakberadaan izin pelaksanaan diskusi kritis sehingga aparat keamanan tidak berada ditempat	Penghentian diskusi sampai aksi anarkis
10	Penyerangan LP Cebongan oleh kelompok Kopassus	Pemuda Nusa Tenggara Timur di Jogja dan kelompok Kopassus	2013	Terbunuhnya Serka Heru Susanto	Solidaritas Korps dan ikatan personal dari anggota Kopassus, sentiment negative terhadap pendatang dari Timur	Pembunuhan terhadap 4 orang yang berada dalam Lapas
11	Penyerangan dan pembubaran pengajian Raudhatul Jannah Kasihan Bantul	Front Jihad Islam dan kelompok pengajian Raudhatul Jannah	2013	Tema pengajian yang mengganggu ketentraman warga	Perbedaan keyakinan dan tafsir keagamaan yang diametral dalam skala hubungan mayoritas-minoritas	Pembubaran pengajian
12	Penolakan peribadatan Kristen Jawa di Paliyan Gunung Kidul	Front Umat Islam dan masyarakat Kristen Jawa	2014	Peribadatan yang dilakukan ditenggarai ada agenda Kristenisasi	Berkembangnya rumor Kristenisasi dalam relasi mayoritas-minoritas	Pembubaran peribadatan
13	Penyerangan dan Pen-	Kelompok	2014	Penggunaan rumah pribadi	Pelampiasan terhadap hu-	Penyerangan dan

	grusakan rumah untuk peribadatan di Ngaglik Sleman	Kristen dan kelompok keagamaan Islam		untuk peribadatan	bungan konfliktual antara kelompok Islam garis keras dengan Sekber yang akut	pengrusakan
13	Penyerangan dan pengrusakan Gereja di Panggukan Sleman	Kristen dan kelompok agama yang tidak mau mengidentifikasi diri (hanya bergamis)	Juni 2014	Trigger tidak spesifik	Rumors adanya Kristenisasi	Penyerangan dan pengrusakan
14	Konflik supporter sepakbola	Supporter PSIM-PSS-Persiba	2010,2011,2013	Pertandingan Derby antara PSIM-PSS atau varian pertandingan yang lain, di mana tuan rumah kalah	Persaingan akut antar supporter yang berafiliasi ke partai politik	Kerusuhan pasca pertandingan
15	Perkelahiaan di Club malam	Sesama kelompok penjunjung	Hampir setiap tahun ada	Gesekan dalam kondisi mabuk	Situasi club malam yang kondusif berupa sajian music yang keras	Perkelahiaan terbatas

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Penelitian yang dilakukan oleh J. Craig Jenkin dalam membangun deteksi dini juga menggunakan data dari PANDA. Jenkins, mengulas metode triple “C”, *Conflict-Carrying Capacity*, sebagai metode yang bisa dipergunakan untuk membuat peta konflik, dan meramalkan konflik yang akan terjadi selanjutnya.⁴ Studi Jenkins ini mengadopsi dari pola *deteksi dini* dalam studi kedokteran maupun bencana alam, dengan menganalogkan konflik sosial sebagai sebuah gejala patologis yang senantiasa bergerak seperti halnya penyakit dalam tubuh manusia, ataupun pergerakan bencana alam.

Dalam studi Jenkins ditemukan bahwa konflik bisa dikelola agar tidak berekskalasi secara vertikal dan horisontal melalui peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, maupun lembaga-lembaga penelitian untuk mendokumentasi pola-pola konflik di suatu masyarakat, dengan mempelajari buku-buku sejarah konflik di suatu masyarakat ataupun melakukan pengamatan konflik di suatu wilayah yang kemudian bisa diperoleh *lesson learned*, yang kemudian tersistematisasi dalam system informasi. Sederhananya, konflik bisa diatasi manakala masyarakat dan pemerintah memiliki kapasitas untuk membaca pergerakan konflik. Dalam praktik pengelolaan eskalasi konflik para penstudi konflik di Eropa dan Amerika Serikat berkecenderungan menggunakan indeks konflik dan kekerasan yang disusun oleh the *Kansas Events Data System (KEDS)/ Protocol for the Analysis of Nonviolent Direct Action (PANDA)* data set that is based on Reuters International Wire Service, atau *Reuters Europe-North America*, yang menggunakan Lexus-Nexus). KEDS dikembangkan oleh Schrodt semenjak 1994 dengan menyusun rangkuman data-data tentang kekerasan dan konflik di dunia.

Peneliti sudah melakukan inisiasi awal dalam studi *deteksi dini* sebagai instrumen pencegahan terjadinya konflik horizontal dalam pelaksanaan Pilkada langsung sedemikian memprihatinkan. Dalam riset peneliti, Pilkada sebagai mekanisme kontestasi konflik politik tidak dipersiapkan *deteksi dini* yang baik di mana kebijakan untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik horizontal dalam Pilkada ternyata lebih banyak mengedepankan pendekatan keamanan dan system informasi konflik secara manual.⁵ Pada sisi yang lain,

⁴ J. Craig Jenkins, 2001, “Conflict-Carrying Capacity, Political Crisis, and Reconstruction: A Framework for the Early Warning of Political System Vulnerability, *Journal of Conflict Resolution Vol. 45 No. 1*

⁵ Surwandono, *Penatalaksanaan Deteksi dini Dalam Pencegahan Konflik Horisontal Pada Pelaksanaan Pilkada Langsung di Jawa Timur*, Jurnal Sosial dan Ilmu Politik UMY, 2010

penyelesaian konflik cenderung menggunakan *security approach* sehingga hanya menciptakan perdamaian sementara, atau sering dikenal dengan konsep *negative peace*. Bukan tidak mungkin, penyelesaian menggunakan pendekatan keamanan justru membuat konflik horisontal menjadi sangat akut dan sulit terselesaikan. Bahkan lembaga-lembaga pengawas pemilu, penyelenggara pemilu juga tidak memiliki instrument yang memadai untuk melakukan pencegahan konflik dalam Pilkada, karena hanya mengandalkan system normative hukum. Jika ada peserta pemilu yang melanggar maka akan berhadapan dengan hukum. Hukum seakan bisa mengatasi masalah secara komprehensif.

Maraknya eskalasi konflik horizontal di masyarakat perkotaan Indonesia akhir-akhir ini berupa bentrokan berdarah antar masyarakat dalam memperjuangkan kepentingannya sebagai bukti bahwa pemerintah gagal dalam membaca dan mengantisipasi pergerakan kekerasan dalam konflik horizontal. Eskalasi kekerasan yang tidak dapat terbaca dengan baik, sangat mungkin disebabkan oleh ketidakberadaan system informasi tentang *deteksi dini* yang komprehensif. Sehingga kebijakan yang dirilis cenderung sebagai kebijakan yang reaksioner, yang tidak dapat berkompetisi secara efektif dalam pencegahan konflik.

Tabel 2
Analisis Trigger dan Akselator Dalam Konflik Tanah di Yogyakarta

No	Kejadian Konflik	Fihak yang berkonflik	Tahun	Trigger	Akselator	Implikasi
1	Penangkapan mahasiswa dan dosen Satya Wacana Salatiga di Yogyakarta		1998	Aksi kampanye dengan pembagian Kalender	Munculnya provokasi dari kelompok masyarakat luar	Mobilisasi massa, demonstrasi
2	Persengketaan antara Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo dengan Keraton terkait rencana penambangan pasir besi	Pro-Penambangan Pasir dan Anti Penambangan Pasir	2010 - 2012	Pembangunan pabrik untuk penambangan pasir besi	Munculnya provokasi melalui aktivitas advokasi, makelar kasus dari kelompok luar	Mobilisasi massa, demonstrasi dan sabotase
3	Persengketaan pembangunan Bandara di Temon	Pihak yang Pro-Bandara dan Anti Bandara	2012	Rencana pembangunan bandara	Munculnya provokasi melalui aktivitas advokasi, makelar kasus dari kelompok luar	Mobilisasi massa, demonstrasi dan sabotase

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan hasil riset, tercermin konflik SARA di level kabupaten dan kota di DIY memiliki rata-rata indeks sebesar : 1,226 . Peneliti membuat kluster indeks konflik dengan klasifikasi sebagai berikut:

Untuk indeks 0 sampai 1 dipilih warna biru muda dengan makna konflik rendah

Untuk indeks 1 sampai 2 dipilih warna biru tua dengan makna konflik sedang

Untuk indeks 2 sampai 3 dipilih warna hijau dengan makna konflik agak tinggi

Untuk indeks 3 sampai 4 dipilih warna merah dengan makna konflik tinggi

Indeks konflik SARA dengan menggunakan kluster ini tergolong ke dalam kluster ke 2, di mana konflik SARA mulai menunjukkan gejala lebih manifest (terbuka) di tengah kultur budaya masyarakat Yogyakarta yang cenderung menempatkan fenomena konflik sebagai hal yang tabu.

Tabel D.1
Indeks Konflik SARA di level Kabupaten dan Kota
Di Propinsi DIY

No.	Kabupaten	Indeks Konflik
1	Kota Jogjakarta	1.56
2	Gunung Kidul	1.31
3	Bantul	1.19
4	Kulon Progo	1.02
5	Sleman	1.05

Sumber: Data Primer

Kota Yogyakarta, dalam konteks ini menempati wilayah dengan indeks konflik SARA paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di DIY. Memang dalam rentang 2012-2013, sejumlah konflik SARA memang marak di kota Yogyakarta sehingga kota Yogyakarta sebagai *city of tolerance* sempat dibahas secara detail dalam beberapa media.. Dan akhir-akhir ini juga mulai marak kembali di Sleman, namun dalam proses pengumpulan data di Sleman, banyak aparat birokrasi sipil dan keamanan belum bersedia memberikan jawaban secara lugas.

Peneliti melakukan analisis penyebab konflik SARA di Yogyakarta dengan diklusterkan berbasis kabupaten dan kota. Pembuatan kluster ini diharapkan dapat melakukan identifikasi factor structural secara lebih cermat dan detail.

Gambaran tentang penyebab konflik SARA di Gunung Kidul tercermin dalam data berikut ini;

Tabel 3
Penyebab Konflik SARA di Kabupaten Gunung Kidul

Fanatisme golongan	15	0.277778
Pemimpin social yang temperamen	1	0.018519
Kecemburuan ekonomi dan social	7	0.12963
Politisasi SARA	1	0.018519
Kombinasi antar faktor	29	0.537037

Sumber: Data Primer

Dari table ini tercermin bahwa timbulnya konflik SARA di kabupaten Gunung Kidul lebih banyak disebabkan oleh kombinasi antara factor, dari tingginya fanatisme golongan, dan kecemburuan social ekonomi. Sebagaimana diketahui, topografis dan geografis Gunung Kidul merupakan daerah pegunungan yang sekarang ini mulai tumbuh dan berkembang secara pesat dengan semakin terbukanya akses infra struktur jalan, dan komunikasi, kabupaten Gunung Kidul menjadi salah satu kabupaten yang mengalami transisi pembangunan yang cukup cepat. Dalam masyarakat transisi ada kecenderungan muncul system pertahanan diri dari anggota masyarakat dengan memperkuat identitas diri dan kelompok. Fanatisme merupakan salah satu mekanisme self-defence untuk dapat bertahan, namun pada sisi yang lain fanatisme yang berlebihan bisa berubah menjadi factor yang mengakselerasi konflik social.

Gambaran tentang penyebab konflik SARA di kota Yogyakarta tercermin dalam data berikut ini;

Tabel 4
Penyebab Konflik SARA di Kota Jogjakarta

Fanatisme golongan	4	0.1
Pemimpin social yang temperamen	5	0.125
Kecemburuan ekonomi dan social	3	0.075
Politisasi SARA	28	0.7
Kombinasi antar factor	0	0

Sumber: Data Primer

Berbeda dengan fenomena di Gunung Kidul, di mana variable kombinas antar factor dominan, di kota Yogyakarta penyebab konflik SARA lebih bersifat jelas. Terdapat data yang kuat bahwa konflik SARA di Yogyakarta lebih banyak disebabkan oleh politisasi dibandingkan dengan factor yang lain. Dalam studi konflik, fenomena seperti ini dapat difahami sebagai sebuah gejala di mana konflik justru ditempatkan sebagai instrument yang penting bagi elit social, politik, dan keagamaan untuk memperjuangkan kepentingan elit ataupun public tertentu. Sebagai daerah yang sebenarnya angka literasi yang tinggi, ternyata masih terdapat ruang yang luas bagi para elit untuk melakukan politisasi. Apakah karena Yogyakarta sebagai kota pelajar masih mengapresiasi tradisi patron-klien yang memang menjadi karakter masyarakat dengan tradisi agraris. Ini yang perlu diteliti lebih jauh.

Gambaran tentang penyebab konflik SARA di kabupaten Bantul tercermin dalam data berikut ini;

Tabel 5
Penyebab Konflik SARA di Kabupaten Bantul

Fanatisme golongan	33	0.66
Pemimpin social yang temperamen	2	0.04
Kecemburuan ekonomi dan social	10	0.2
Politisasi SARA	5	0.1
Kombinasi antar factor	0	0

Sumber: Data Primer

Berbeda dengan fenomena di Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta, factor yang paling kritikal yang mempercepat terjadinya konflik SARA justru lebih disebabkan oleh fanatisme golongan yang mencapai 66%. Politisasi SARA oleh elit ternyata tidak banyak mempengaruhi kualitas eskalasi konflik SARA. Sepertinya penjelasan di Gunung Kidul juga dapat dipergunakan untuk menganalisis mengapa konflik SARA di Kabupaten Bantul signifikan, yakni masyarakat Bantul juga sedang mengalami transisi kehidupan keagamaan, social, ekonomi, sehingga pilihan fanatisme golongan menjadi mekanisme *self-defence* untuk melindungi kepentingan kelompok.

Gambaran tentang penyebab konflik SARA di kabupaten Kulon Progo tercermin dalam data berikut ini;

Tabel 6

Penyebab Konflik SARA di Kabupaten Kulon Progo

Fanatisme golongan	4	0.114286
Pemimpin social yang temperamen	0	0
Kecemburuan ekonomi dan social	0	0
Politisasi SARA	0	0
Kombinasi antar faktor	31	0.885714

Sumber: Data Primer

Dari data ini tercermin bahwa ada kecenderungan data terkumpul dalam dua kelompok besar, yakni penyebab konflik SARA merupakan kombinasi banyak factor, dan hanya sebagian kecil karena fanatisme golongan. Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak adanya factor yang pasti dalam proses eskalasi konflik di Kulon Progo. Dalam faktanya memang kabupaten Kulon Progo tidak banyak terjadi kasus konflik SARA, sehingga responden menjawab lebih dengan menggunakan dugaan dari beberapa fenomena yang terjadi. Sehingga dalam konteks ini, factor trigger dan akselerator konflik SARA di Kulon Progo relative tidak signifikan.

Gambaran tentang penyebab konflik SARA di kabupaten Sleman tercermin dalam data berikut ini;

Tabel 7
Penyebab Konflik SARA di Kabupaten Sleman

Fanatisme golongan	6	0.545455
Pemimpin social yang temperamen	2	0.181818
Kecemburuan ekonomi dan social	0	0
Politisasi SARA	1	0.090909
Kombinasi antar faktor	2	0.181818

Sumber: Data Primer

Jumlah responden yang bersedia untuk mengisi seputar konflik SARA di kabupaten Sleman hanya sekitar 15 % dari total responden di kabupaten Sleman. Dari data yang tersedia, ternyata factor fanatisme golongan menjadi factor yang kritikal dalam konteks konflik SARA di Sleman, sebagaimana juga terjadi di Kabupaten Bantul. Dari sini dapat difahami bahwa fanatisme golongan di Kabupaten Sleman dapat ditempatkan sebagai factor akselerator dalam konflik SARA.

Berdasarkan hasil riset, tercermin konflik tanah di level kabupaten dan kota di DIY mencapai rata-rata 1.366. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan indeks konflik SARA. Terdapat hal yang agak unik, ternyata konflik tanah berdasarkan hasil survey di aparat birokrasi sipil dan keamanan di propinsi DIY, kabupaten Gunung Kidul menempati posisi paling tinggi. Untuk lebih tercermin dalam dalam table berikut

Tabel 8
Indeks Konflik Tanah di level Kabupaten dan Kota
Di Propinsi DIY

No.	Kabupaten	Indeks Konflik
1	Gunung Kidul	1.85
2	Kota Jogjakarta	1.43
3	Bantul	1.25
4	Kulon Progo	1.21
5	Sleman	1.09

Sumber: Data Primer

Peneliti melakukan analisis penyebab konflik tanah di Yogyakarta dengan diklusterkan berbasis kabupaten dan kota. Pembuatan kluster ini diharapkan dapat melakukan identifikasi factor structural secara lebih cermat dan detil.

Gambaran tentang penyebab konflik tanah di kabupaten Gunung Kidul tercermin dalam data berikut ini;

Tabel 9
Penyebab Konflik Tanah di Kabupaten Gunung Kidul

Ketidakjelasan status legal tanah	8	0.145455
Konflik pembagian warisan	7	0.127273
Pemberian Kompensasi yang tidak memuaskan untuk peruntukan lahan	6	0.109091
Perebutan tanah sacral	0	0
Kombinasi antar factor	33	0.6

Sumber: Data Primer

Dari table di atas tercermin bahwa factor yang paling tinggi menyebabkan eskalasi konflik tanah di Gunung Kidul bersifat multifactorial yang berjalan secara simultan. Namun juga ditemukan factor yang juga cukup tinggi prosentasenya adalah persoalan ketidakpastian status legal tanah, yang dapat difahami sebagai factor pemicu, namun factor akselerasi belum banyak diungkap lebih jauh.

Gambaran tentang penyebab konflik tanah di kota Yogyakarta tercermin dalam data berikut ini;

Tabel 10

Penyebab Konflik Tanah di Kota Jogjakarta

Ketidakjelasan status legal tanah	7	0.179487
Konflik pembagian warisan	7	0.179487
Pemberian Kompensasi yang tidak memuaskan untuk peruntukan lahan	0	0
Perebutan tanah sacral	25	0.641026
Kombinasi antar factor	0	0

Sumber: Data Primer

Dari data table di atas tercermin bahwa konflik tanah di kota Yogyakarta banyak terjadi karena persoalan posisi tanah *adat atau magersari*, yang biasanya berhimpit antara persoalan tanah sacral dan status legal tanah. Fenomena ini memang cukup banyak mewarnai sejumlah konflik tanah di kota Yogyakarta, yang bisa ditempatkan sebagai variable akselerator. Sedangkan faktor ketidakjelasan status legal dan konflik pembagian warisan tanah dalam batas tertentu dapat dipertimbangkan sebagai variable trigger.

Gambaran tentang penyebab konflik tanah di kabupaten Bantul tercermin dalam data berikut ini;

Tabel 11

Penyebab Konflik Tanah di Kabupaten Bantul

Ketidakjelasan status legal tanah	33	0.478261
Konflik pembagian warisan	36	0.521739
Pemberian Kompensasi yang tidak memuaskan untuk peruntukan lahan	0	0
Perebutan tanah sacral	0	0
Kombinasi antar factor	0	0

Sumber: Data Primer

Dari data table di atas tercermin bahwa konflik tanah di kabupaten Bantul banyak terjadi karena persoalan pembagian warisan yang dianggap tidak adil, ataupun factor status legal tanah. Fenomena ini memang cukup banyak mewarnai sejumlah konflik tanah di kabupaten Bantul, yang bisa ditempatkan sebagai variable akselerator maupun trigger. Dari pengamatan di lapangan, konflik pembagian warisan tanah dalam batas tertentu dapat dipertimbangkan sebagai variable trigger, sedangkan status kejelasan tanah ditempatkan sebagai akselerator.

Gambaran tentang penyebab konflik tanah di kabupaten Kulon Progo tercermin dalam data berikut ini;

Tabel 12

Penyebab Konflik Tanah di Kabupaten Kulon Progo

Ketidakjelasan status legal tanah	1	0.027778
Konflik pembagian warisan	5	0.138889
Pemberian Kompensasi yang tidak memuaskan untuk peruntukan lahan	0	0
Perebutan tanah sacral	0	0
Kombinasi antar factor	30	0.833333

Sumber: Data Primer

Dari data table di atas tercermin bahwa konflik tanah di kabupaten Kulon Progo banyak terjadi karena kombinasi antar factor yang mencapai 80%. Fenomena ini menjadi sulit untuk mengidentifikasi variable trigger maupun akselerator.

Gambaran tentang penyebab konflik tanah di kabupaten Sleman tercermin dalam data berikut ini;

Tabel 13

Penyebab Konflik Tanah di Kabupaten Sleman

Ketidakjelasan status legal tanah	5	0.357143
Konflik pembagian warisan	5	0.357143
Pemberian Kompensasi yang tidak memuaskan untuk peruntukan lahan	0	0
Perebutan tanah sacral	0	0
Kombinasi antar factor	4	0.285714

Sumber: Data Primer

Dari data table di atas tercermin bahwa konflik tanah di kabupaten Sleman, banyak terjadi karena persoalan pembagian warisan yang dianggap tidak adil, ataupun factor status legal tanah. Fenomena ini memang cukup banyak mewarnai sejumlah konflik tanah di kabupaten Sleman, yang bisa ditempatkan sebagai variable akselerator maupun trigger. Dari pengamatan di lapangan, konflik pembagian warisan tanah dalam batas tertentu dapat dipertimbangkan sebagai variable trigger, sedangkan status kejelasan tanah ditempatkan sebagai akselerator. Meskipun juga perlu dicatat, birokrasi yang bersedia mengisi quisioer sangatlah kurang memadai karena hanya mencapai 20%, sehingga perlu dilakukan pengamatan ulang.

PETA JALAN PENELITIAN PENELITI

Dalam 10 tahun terakhir, ketua peneliti telah melakukan serangkaian riset yang terkait dengan resolusi konflik dengan model deduktif, yakni melakukan kajian secara general terhadap fenomena konflik di berbagai wilayah, seperti di Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Asia Timur. Dalam riset tersebut, penulis menemukan 3 faktor utama penyebab konflik. Pertama, konflik ditimbulkan karena factor primordialitas seperti issue suku, agama, kelompok sosial, yang marak pasca dirilisnya tesis besar Huntington tentang benturan peradaban (*clash of civilization*). Dalam decade 1990 sampai 2000, konflik dengan nuansa primordial marak di Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, dan Indonesia.⁶

Kedua, Konflik ditimbulkan oleh pemaknaan konflik sebagai instrument penting bagi tokoh masyarakat/elit untuk mendapatkan, mempertahankan, dan meluaskan kekuasaan. Konflik justru sebagai medan investasi penting bagi tokoh masyarakat untuk senantiasa menjadi tokoh dan elit dalam masyarakat. Riset peneliti tentang konflik seputar Pilkada menunjukkan bahwa para elit politik mempergunakan konflik sebagai upaya untuk membangun kohesivitas kelompok dalam memenangkan proses politik. Bahkan jika dalam pilkada suatu elit politik kalah, maka konflik dipergunakan sebagai sarana bargaining politik bagi elit kepada elit terpilih.⁷

Dalam konteks konflik etnis, pola-pola instrumentasi konflik juga tampak dalam konflik etnis yang bernuansakan separatism. Beberapa studi separatism Aceh dan Papua di Indonesia, Moro di Filipina, Pattani di Thailand juga menunjukkan pola yang khas, di mana tetap berlangsung konflik separatism sebagai bagian dari strategi besar agar actor utama konflik tetap menjadi elit yang dapat memperoleh keuntungan di tengah berlangsungnya konflik. Konflik diyakini lebih produktif untuk memperjuangkan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial, dibandingkan dengan pilihan melakukan perdamaian, namun

⁶ Surwandono, *Relasi Konflik dan Geografi Politik di Asia Tenggara*, UMY, 2003, Surwandono, *Relasi Konflik dan Geografi Politik di Timur Tengah*, UMY, 2002, Surwandono, *Relasi Konflik dan Geografi Politik di Asia Selatan*, UMY, 2004. Untuk analisis lebih detil dalam Surwandono dan Sidiq Ahmadi, *Resolusi Konflik di Dunia Islam*, Jakarta, Ghalia Ilmu, 2011

⁷ Surwandono dan Ali Muhammad, *Penatalaksanaan Deteksi dini Dalam Pelaksanaan Pilkada Langsung*, Riset Strategis Nasional, 2009

tidak ada garansi bahwa actor konflik tidak mendapatkan posisi yang lebih baik dibandingkan ketika menjalani peran konflik.⁸

Setelah melakukan penelaahan konflik di tingkat global, dan regional, peneliti mulai melakukan serangkaian riset di tingkat nasional dan local. Peneliti telah melakukan penelitian tentang peningkatan kapasitas perempuan sebagai actor resolusi konflik etnis di Indonesia.⁹ Peneliti juga melakukan penelitian tentang Pelembagaan Nilai Javanese Wisdom Sebagai Nilai Resolusi Konflik Dalam Partai Politik di Yogyakarta.¹⁰ Dari dua penelitian ini, peneliti membangun tesis bahwa efektivitas resolusi konflik sangat terkait dengan konstruksi sosial masyarakat. Model resolusi konflik yang tidak disesuaikan dengan realitas konstruksi sosial masyarakat justru akan memperkeruh konflik itu sendiri. Temuan peneliti ini mempertegas temuan peneliti sebelumnya, Irwan Abdullah yang menyatakan bahwa proses membangun resolusi konflik dengan nilai local juga harus berhati-hati karena juga ada peluang bias-bias nilai.¹¹

Dalam dua tahun terakhir, peneliti melakukan serangkaian riset tentang konflik di ranah lembaga pendidikan dan generasi muda. Riset yang pertama terkait dengan studi konflik di organisasi ekstra kampus berbasis Islam dalam mendiskusikan pemikiran Islam Liberal dan fundamental. Penelitian ini menfokuskan pada intervensi nilai Fiqh Perbedaan sebagai sebuah nilai baru dalam mendiskusikan pemikiran yang sering ditempatkan dalam posisi diametral. Internalisasi nilai fiqh perbedaan dalam dunia organisasi mahasiswa yang sering berwatak idioiogis ternyata berpengaruh besar kepada pola diskursus pemikiran yang lebih dialogis,¹² sehingga interaksi antar organisasi ekstra kampus tidak lagi berwatak konfrontatif kekerasan. Internalisasi fiqh perbedaan mampu memberikan perubahan paradigm dalam memandang musuh atau competitor secara proporsional.

⁸ Lebih jauh lihat analisis Surwandono, *Dinamika Konflik dan Negosiasi di Mindanao*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012

⁹ Lihat dalam Surwandono dan Ratih Heringtyas, *Peningkatan Kapasitas Perempuan Sebagai Actor Resolusi Konflik Etnis di Indonesia*, Hibah Bersaing Dikti, 2009

¹⁰ Lihat dalam Surwandono dan Sugito, *Pelembagaan Nilai Javanese Wisdom Sebagai Nilai Resolusi Konflik Dalam Partai Politik di Yogyakarta*, Hibah Bersaing Dikti, 2009.

¹¹ Lihat dalam Irwan Abdullah, Abdullah, Irwan, "Penggunaan dan Penyalahgunaan Budaya dalam resolusi konflik di Indonesia", *Antropologi Indonesia Vol. 25 No. 66, 2002*

¹² Lihat dalam Surwandono dan Sidiq Ahmadi, *Pelembagaan Fiqh Perbedaan Dalam Mendiskusikan Pemikiran Islam Berbasis Liberal dan Fundamental Pada Organisasi Ekstra Kampus Berbasis Islam di Yogyakarta*, Hibah Bersaing Dikti, 2010-2011,

Riset yang kedua terkait dengan praktik bullying di lingkungan sekolah. Dalam riset ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap kelompok Genk Sekolah di Yogyakarta.¹³ Dari riset ini peneliti menemukan fenomena unik dari tradisi bullying di beberapa sekolah di Yogyakarta. Pertama, pembentukan Genk Sekolah dalam batas tertentu merupakan upaya untuk mempertahankan eksistensi diri dari ancaman genk sekolah lain. Sehingga ada kecenderungan beberapa sekolah, seakan memberikan ruang toleransi bagi keberadaan genk sekolah. **Kedua**, bertahannya Genk sekolah juga terkait erat dengan tidak adanya keberanian dari korban maupun *bystander* (fihak yang melihat ada fenomena bullying) untuk melaporkan fenomena ini kepada sekolah. Riset ini menunjukkan bahwa bertahannya praktek bullying di sekolah terkait erat dengan gejala strukturasi dan kulturasi bullying. Dalam riset peniliti, efektivitas pencegahan praktik anti bullying di sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam membangun paradigm berkonflik dalam dunia kesiswaan. Konflik dalam dunia kesiswaan adalah konflik untuk berlatih membangun argument bukan untuk membangun keberaniaan mengalahkan fihak lain dengan cara-cara kekerasan dan paksaan.

Pengalaman penelitian peneliti dalam penatalaksanaan *deteksi dini* dalam pencegahan konflik horizontal dalam Pilkada langsung memberikan landasan penting bagi riset penulis terkait dengan proses pembuatan software yang dapat dipergunakan untuk mendokumentasi dan menganalisis pola eskalasi konflik yang kemudian dapat disusun sebagai indeks konflik. Indeks konflik horisontal yang komprehensif sebenarnya adalah jawaban untuk mencegah konflik horisontal yang sering timbul di Indonesia, di mana ditandai gejala yang sama bahwa masyarakat, organisasi, bahna pemerintah tidak mampu membaca ke mana arah konflik yang ada karena semata-mata tidak adanya data seputar indeks konflik horisontal. Yang dimaksud dengan indeks konflik horisontal adalah pemetaan daerah rawan konflik yang justifikasinya tidak hanya karena temperamental orang tinggi atau karena ada proses pilkada yang secara hampir bersamaan, namun justifikasi yang digunakan lebih daripada itu.

Justifikasi yang digunakan untuk membuat indeks konflik horisontal misalnya tentang sejarah konflik yang terjadi di daerah tersebut, karakter masyarakat, aktor-aktor

¹³ Lihat dalam Tunjung Sulaksono, dan Surwandono, Peningkatan Kapasitas Manajemen Konflik Guru Dalam pencegahan Praktik Bullying Pada SMA di Yogyakarta, Hibah Bersaing Dikti, 2010-2011.

yang sering terlibat konflik, pemicu konflik yang sering muncul, basis partai politik, basis pendukung calon gubernur, tempat kelahiran kandidat, tingkat kedewasaan berpolitik masyarakat setempat. Semua argumentasi dasar tersebut kemudian dijadikan satu dan disusunlah indeks konflik horisontal serta ditentukan mana daerah yang paling rawan, daerah yang sedang dan daerah yang aman berdasarkan justifikasi-justifikasi tersebut.¹⁴ Model penyusunan indeks konflik sudah peneliti kaji secara mendalam dalam buku Statistik dan Hubungan Internasional.

Peta jalan penelitian yang akan dilakukan dalam upaya pembuatan software adalah sebagai berikut:

Pertama, melakukan diskursus secara intensif tentang penyebab, dan pola eskalasi konflik horizontal sebagai database awal untuk membangun logika dasar pembuatan software.

Kedua, melakukan perancangan diagram alur dengan programmer sebagai langkah penting dalam perancangan desain software dengan menggunakan program Delphier.

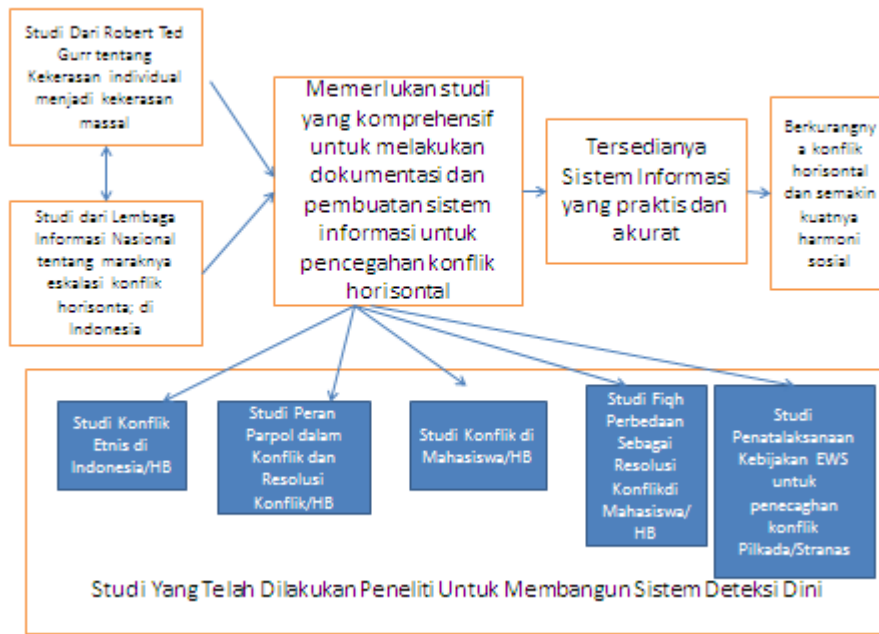
Ketiga, mensimulasikan dummy software untuk menguji kehandalan software sebagai software yang customized, dan melakukan perbaikan-perbaikan baik display , animasi, maupun system informasi yang belum tercover.

Keempat, melakukan ujicoba software untuk stakeholder terbatas, untuk membantu pendokumentasian, penganalisaan data-data konflik horizontal secara sederhana.

Kelima, mendesiminasikan software sebagai system informasi yang handal dalam pengelolaan data konflik horisontal sebagai alat untuk pencegahan eskalasi konflik horisontal.

¹⁴ Ibid. hal. 160

Diagram 1
Peta Jalan Penelitian



BAB III METODE PENELITIAN

Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang factor-faktor yang menyebabkan konflik horizontal maupun pola-pola eskalasi konflik horizontal di perkotaan. Langkah untuk mengetahui penyebab dan pola konflik horizontal di perkotaan adalah sebagai berikut; 1) bagaimana stakeholders konflik horizontal dari Pilkada langsung, mengelola data tentang dinamika konflik horizontal untuk dijadikan acuan penting dalam mengelola konflik horizontal di daerah. 2) Bagaimana kesiapan sistemik dari stakeholder konflik horizontal dalam mengelola informasi yang terkait dengan konflik horizontal untuk dijadikan suatu system informasi yang terpadu.

Tekhnik pengumpulan data

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder dari para stakeholders konflik horisontal, baik melalui pengumpulan dokumen-dokumen fakta konflik horizontal maupun kebijakan politik terkait dengan manajemen konflik horisontal, maupun dokumen dari media massa yang melakukan expose terhadap berita terjadinya konflik horizontal..

Untuk memperoleh data primer terkait dengan factor-faktor utama (underlying factors), factor-faktor pemicu eskalasi konflik maupun pola-pola eskalasi konflik horizontal dilakukan melalui *deep interview* dengan para narasumber yang kompeten. Ada sekitar 15 orang narasumber yang menjadi rujukan dalam deep interview ini, baik di tingkat nasional maupun propinsi, yang terdiri dari pakar konflik maupun birokrasi pemerintahan seperti Kepolisian Daerah.

Teknis analisis data

Untuk mendapatkan obyektivikasi yang tinggi dalam penelitian ini, dilakukan analisis secara bertahap. **Pertama**, melakukan analisis isi terhadap dokumen-dokumen kebijakan politik, social, ekonomi, pendidikan yang terkait dengan pencegahan konflik horizontal, termasuk di dalamnya instrument maupun sumber daya yang dipergunakan untuk mengelola konflik horizontal.

Kedua, melakukan interpretasi dari berbagai temuan dokumen, wawancara mendalam untuk membuat benang merah hubungan antar variable yang menyebabkan konflik horizontal termasuk di dalamnya pola-pola eskalasinya. Hasil interpretasi ini digunakan sebagai bahan dasar bagi penyusunan rancangan software *deteksi dini* konflik horisontal () untuk pencegahan konflik horizontal.

Ketiga, melakukan perancangan melalui computer programming untuk mendapatkan software yang *customized* dan *friendly* bagi stakeholder konflik horizontal.

Populasi dan sampel

Populasi penelitian adalah *stakeholders* konflik horizontal yang mendokumentasi data konflik horisontal secara manual yakni Kepolisian daerah, tokoh Organisasi Sipil-Keagamaan (*civil society organizations*), Lembaga Riset, DPRD, Bawaslu. Penentuan Sampel dilakukan melalui *purposive random sampling*, yang dimaksudkan untuk mengetahui posisi dan langkah yang diambil oleh para *stakeholders* dalam mengelola konflik horizontal di perkotaan.

Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh Propinsi yang berada di Pulau Jawa. Penelitian dilakukan melalui dua tahapan besar. Pertama, melakukan studi dan eksplorasi data di propinsi-propinsi tersebut untuk mengetahui dinamika konflik horisontal untuk pengumpulan data, konfirmasi data maupun studi lapangan.

Kedua, melakukan studi perancangan software dan simulasi software yang akan dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Hubungan Internasional UMY, dengan melibatkan pakar di bidang teknologi informasi maupun pakar sosial.

Rancangan Penelitian Pembuatan Software

No	Aktivitas	Tujuan	Tehnik Pengumpulan Data	Tehnik Analisis Data	Luaran	Tahun Implementasi
1	Merancang software <i>Deteksi dini</i> Konflik Horisontal () yang dapat digunakan untuk mendokumentasi, menganalisis dan merancang kebijakan untuk mengelola konflik horisontal berbasis masyarakat perkotaan di Indonesia secara efektif dan efisien.	Terselesaikanya software sebagai sistem informasi terpadu dalam pengelolaan data konflik horisontal	Menggunakan Program Microsft Access	Analisis Sistem Informasi	Software yang customized	Tahun ke 1
2	Mensimulasikan software <i>Deteksi dini</i> Konflik Horisontal () kepada stakeholder konflik horisontal secara terbatas	Tersimulasikannya software	Simulasi terbatas		Stakeholder dapat menjalankan software secara trampil	Tahun ke 1
6	Mendesiminasiakan software <i>Early Warning System</i> Konflik Horisontal () yang dapat digunakan untuk mendokumentasi, menganalisis dan merancang kebijakan untuk mengelola konflik horisontal di Indonesia secara efektif dan efisien.	Terdesiminasiakannya Software	In-house training		Stakeholder dapat mengaplikasikan software untuk pendokumentasian, penganalisaan, dan pengambilan keputusan terkait dengan konflik horisontal	Tahun ke 2
7	Mendesiminasiakan hasil penelitian dan software dalam konferensi internasional	Tersampaiakannya hasil riset dan software dalam konferensi internasional	Mengirimkan naskah		Menjadi pembicara dalam konferensi internasional	Tahun 2
8	Membuat artikel, buku tentang deteksi dini konflik horisontal	Terpublikasikannya artikel dan buku	Mengirim naskah ke penerbit		Buku dan Artikel Terbit	Tahun 3
9	Mengurus Paten ke Dirjen HAKI	Terdaftarkannya Software dalam Paten	Mengirim hasil riset ke Dirjen HAKI		Hasil Riset dan Software mendapatkan Paten	Tahun 3

BAB IV

PEMBAHASAN

Penelitian telah melakukan sejumlah kegiatan yakni:

1. Penulisan artikel konferensi, yang sudah dikirimkan dalam Konferensi AICIS di UIN Raden Intan Lampung (terlampir)
2. Penulisan artikel Jurnal, yang akan dikirimkan ke Jurnal Telkomnika
3. Sedangkan penyusunan software dalam proses pembuatan simulasi diagram alur, dan dalam proses penyelesaian akhir. Diharapkan sekitar Oktober, software sudah jadi dan dapat diperasikan.

**SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL
KEAGAMAAN DI YOGYAKARTA**

Dr. Surwandono
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Kampus terpadu UMY Jl. Lingkar Barat Tamantirto
Kasihan Bantul Yogyakarta
wsurwandono@yahoo.com



**THE 16th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE
ON ISLAMIC STUDIES (AICIS) 2016**

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
GENERAL DIRECTORATE OF ISLAMIC EDUCATION
DIRECTORATE OF ISLAMIC HIGHER EDUCATION
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOVEMBER 1-4, 2016

[13pt ARIAL] CONTENTS

Abstract	1
Heading Style 1	1
Heading Style 2	Error! Bookmark not defined.
Another style-3 subheading under heading 2	Error! Bookmark not defined.
Aknowledgment.	3
Bibliography	Error! Bookmark not defined.
Autobiography.....	3

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN DI YOGYAKARTA

SURWANDONO

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Kampus Terpadu UMY Jl. Lingkar Barat tamantirto kasihan Bantul Yogyakarta
Mailing address
Email: wsurwandono@yahoo.com

Abstract

This article will explain the relevance of conflict management using information systems and technology. Conflict information system was built by a team of Master in Political Science and International Relations Universitas Muhammadiyah Yogyakarta using Transcend model that developed by Johan Galtung and combined with SAT models (structural, accelerator, trigger) developed by Ichsan malik. Information system conflicts use formal legal approach, in which the parties reporting the data conflict is among the local government at district level, and the upper level in the district / city to supervise and coordinate with related parties for effective decision making. Conflict information systems have function in displaying data conflicts in a number of graphical form in the map's link with google maps, and various table polygon in real time. Using conflict information system will allow decision-makers to observe the dynamics of the behavior of religious social conflict, to track the sources of conflict and take the right decision and measurable.

Keywords: information system conflicts, conflict management, social and religious conflict

Abstrak

Artikel ini hendak menjelaskan tentang relevansi pengelolaan konflik dengan menggunakan system informasi dan tehnologi. Sistem informasi konflik dibangun oleh team dari Magister Ilmu Politik dan hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan menggunakan basis Transcend Model yang dikembangkan oleh Johan Galtung dan dikombinasikan dengan model SAT (structural, accelerator, trigger) yang dikembangkan oleh Ichsan malik. Sistem informasi konflik menggunakan pendekatan legal formal, di mana pihak yang melaporkan data konflik adalah dari kalangan pemerintah daerah di level kecamatan, dan level di atasnya di kabupaten/kota melakukan supervisi dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk pengambilan keputusan yang efektif. Sistem informasi konflik mampu menampilkan data konflik dalam sejumlah grafis berupa peta yang di-link-an dengan google maps, table polygon dengan variasi secara real time. Dengan system informasi konflik akan memudahkan para pengambil keputusan untuk mengamati dinamika perilaku konflik social keagamaan, melacak sumber-sumber penyebab konflik dan mengambil keputusan yang tepat dan terukur.

Kata Kunci: Sistem informasi konflik, manajemen konflik, social and religious conflict

Pendahuluan

Konflik social keagamaan di dunia menunjukkan eskalasi konflik yang berarti. Dalam decade 1990-an, fenomena konflik social keagamaan bercorakan konflik lintas agama, yang terepresentasi konflik Yahudi-Islam dalam konflik Israel-Palestina, Hindu-Muslim di India, Kristen-Islam dalam konflik Bosnia-Serbia, yang kemudian menyebar ke Indonesia dalam bentuk konflik di Ambon, dan Poso.

Memasuki decade pertama pasca tahun 2000, konflik keagamaan antar kelompok islam cenderung semakin menguat, yang ditandai dengan perpecahan antar faksi yang ada dalam kelompok Mujahidin Afhanistan, antar kelompok pro-Jihadi dan Non Jihadi untuk membangun Afghanistan ke depan, yang kemudian melahirkan faksi mujahidin jihadi di Afghanistan dengan idiologi takfiri, dan memudahkan pilihan berkonflik dengan kekerasan meskipun dengan sesama muslim.

Eskalasi konfrontasi sesama kelompok Islam menguat kembali dengan fenomena konflik Sunni-Syiah yang mewarnai dinamika konflik di Suriah yang kemudian menyebar ke Iraq, dan kemudian melahirkan kelompok ISIS yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan konflik sesama muslim.

Dalam konteks di Indonesia, gelombang konflik keagamaan antar kelompok islam juga cukup marak, di mana tensi ketegangan antar organisasi islam muncul menjelang peristiwa politik, baik dalam kampanye rekrutmen politik eksekutif atau legislative dalam Pemilu. Bukan hanya itu, konflik antar organisasi Islam juga sering muncul dalam ranah demokratisasi, di mana proses perebutan akses public, baik dalam issue ekonomi, social, keagamaan, kebudayaan, pendidikan telah melahirkan sejumlah friksi yang semakin meningkat.

Ada kecenderungan besar, bahwa para penstudi konflik maupun aparat yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengelola konflik belum memanfaatkan teknologi informasi secara memadai. Hampir tidak ditemukan suatu organisasi riset, lembaga pendidikan, universitas atau departemen pemerintah yang secara rutin melakukan pemetaan konflik social keagamaan secara serius. Meskipun amanat UU No. 7 tahun 2012 tentang Pencegahan Konflik Sosial, mengamanatkan pentingnya deteksi dini dalam pencegahan konflik social.

Kondisi ini mengakibatkan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan konflik social keagamaan tidak maksimal, dan cenderung reaktif, dan akhirnya kebijakan

utama untuk mencegah perluasan konflik dengan cara represif dan militeristik. Tidak terantisipasi pergerakan konflik social keagamaan dalam skala massif, yang tidak terkelola dengan baik, akan melairkan model konflik social keagamaan seperti yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, berupa ledakan konflik social keagamaan yang destruktif dan massif.

Problem utama yang menyebabkan konflik social dalam masyarakat tidak mampu dikelola dengan baik, dalam studi yang dilakukan oleh Robert Trappl adalah ketidakberadaan data konflik yang terdokumentasi secara sistematis dan kontinum. Penyusunan data konflik secara sistematis akan memungkinkan ditemukannya pola konflik, kapan muncul, bagaimana manifestasinya, kapan mengalami eskalasi, dan kapan mencapainya puncaknya berupa stalemate.

Tinjauan Pustaka

Sejumlah studi tentang pemetaan konflik sudah dilakukan oleh Lembaga Informasi Nasional (LIN) selama 5 tahun (dari 2000-2005) melalui melakukan penelitian terhadap konflik-konflik horizontal etnis di Indonesia, baik di Papua, Poso, Ambon, Aceh, Sampit-Dayak, maupun di Jawa Timur. Terdapat temuan yang menarik dari penelitian yang dilakukan oleh LIN bahwa konflik horizontal yang

berbasis di daerah konflik sangat berhubungan erat dengan proses pemilihan kepala daerah. (LIN, 2004)

Studi tentang arti penting pemetaan konflik dengan menggunakan bahasa software dilakukan oleh sejumlah ilmuwan seperti penelitian yang dilakukan oleh J. Craig Jenkin dalam membangun system informasi *early warning system* menggunakan data elektronik PANDA. Jenkin menggunakan metode triple "C", *Conflict-Carrying Capacity*, sebagai metode yang bisa dipergunakan untuk membuat peta konflik, dan meramalkan konflik yang akan terjadi selanjutnya. (J. Craig Jenkins, 2001)

Studi Jenkins ini mengadopsi dari pola *early warning system* dalam studi kedokteran maupun bencana alam, dengan menganalogkan konflik sosial sebagai sebuah gejala patologis yang senantiasa bergerak seperti halnya penyakit dalam tubuh manusia, ataupun pergerakan bencana alam. (J. Craig Jenkins, 2001)

Dalam praktik pengelolaan eskalasi konflik para penstudi konflik di Eropa dan Amerika Serikat berkecenderungan menggunakan indeks konflik dan kekerasan yang disusun oleh the *Kansas Events Data System (KEDS)/ Protocol for the Analysis of Nonviolent Direct Action (PANDA)* data set that is based on Reuters International Wire Service, atau *Reuters Europe-North*

America, yang menggunakan Lexus-Nexus). KEDS dikembangkan oleh Schrodtt semenjak 1994 dengan menyusun rangkuman data-data tentang kekerasan dan konflik di dunia.

Dalam konteks membangun software system informasi pengelolaan konflik, Robert Trappl memandang perlu membangun system informasi yang mengubah data-data manual ke dalam data elektronik dengan didokumentasi secara massif. Ketersediaan data secara massif, berkesinambungan, dan dapat disajikan secara real time akan dapat membantu pengelolaan konflik secara efisien dan produktif. Pola kemunculan konflik, bergerakanya konflik, bahkan meletus tidak melutusnya konflik akan dapat diketahui secara lebih pasti sehingga akan membantu proses pengambilan keputusan tentang konflik secara lebih terukur. (Robert Trappl, 2014)

Surwandono telah mengembangkan software pengelolaan konflik social di Yogyakarta, dengan menggunakan pendekatan *legal-formal* dan *bottom-up*, di mana basis data dikumpulkan dari birokrasi, seperti Kepolisian (Polsek), Tentara Nasional Indonesia (Koramil), dan Kecamatan sebagai unit paling bawah yang berinteraksi secara langsung dengan fakta konflik itu sendiri. (Surwandono, 2015)

Terkait dengan pengembangan software tersebut, Surwandono mengembangkan model Transcend yang dikembangkan oleh Johan Galtung, dengan memahami perilaku konflik seperti halnya perilaku demam yang dapat diamati pola perilakunya. Misalnya ada demam yang disebabkan oleh virus di mana memiliki kekhasan perilaku demam, yang berbeda dengan demam karena sebab bakteri maupun karena sebab tidak spesifik. (Johan Galtung, 2007). Dari sinilah kemudian dapat diukur indicator perilaku konflik seperti jumlah actor, intensitas konfliknya, penggunaan sarana konfliknya, jumlah korban dan dampak konfliknya.

Untuk memahami perilaku konflik secara riil, software juga menggunakan model SAT yang dikembangkan oleh Ichsan Malik. SAT sendiri adalah kombinasi antar factor yang membentuk konflik, seperti factor structural, yakni factor utama yang menyebabkan konflik terjadi, factor akselerator yakni factor yang mengakselerasi konflik dari latent menjadi manifest bahkan sampai menimbulkan stalemate. Dan factor trigger yakni yang memicu terjadinya konflik. Dalam gambaran sederhana dalam proses kebakaran hutan, factor structural adalah kondisi hutan yang sangat kering, factor pemicunya adanya titik api kecil, sampai

dengan factor akselerator seperti angin yang membuat kebakaran hutan menjadi meluas. (Ichsan Malik, 2007)

Metode penelitian

Penelitian tentang penyusunan indeks dan peta konflik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan data riil dari dinamika konflik yang berkembang dalam masyarakat. Dengan pendekatan kuantitatif, akan melakukan pengukuran fenomena konflik dengan didasarkan oleh beberapa indikator penting yang meliputi:

1. Intensitas konflik, yakni berapa kali kejadian konflik timbul dalam kurun waktu satu tahun.
2. Jumlah orang atau pihak (*parties*), yakni berapa banyak orang yang terlibat dalam konflik
3. Penggunaan instrumen kekerasan dalam konflik, yakni instrumen kekerasan apa saja yang dipergunakan, dari kekerasan psikis/verbal sampai kekerasan fisik.
4. Jumlah korban, yakni berapa banyak yang menjadi korban, baik dari korban luka sampai meninggal dunia
5. Dampak konflik, yakni dampak apa saja yang ditimbulkan dari konflik tersebut, seperti dampak social, ekonomi, politik, budaya.

Data penelitian penyusunan indeks dan peta konflik diperoleh melalui survai terhadap stakeholder konflik di Propinsi Daerah Istimewa. Survai akan dilakukan terhadap seluruh kecamatan yang berada di DIY yang berjumlah 78 kecamatan, yang meliputi 17 kecamatan di Kabupaten Bantul, 18 kecamatan di kabupaten Gunung Kidul, 17 Kecamatan di Kabupaten Sleman, 12 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, dan 14 kecamatan di kota Yogyakarta. Survai akan dilakukan melalui penyebaran kuisioner secara fisik, dengan langsung melakukan wawancara dengan 78 birokrasi di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) di 78 kecamatan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Analisis data yang dipilih dalam pembuatan konflik akan mempergunakan analisa statistic deskriptif yakni menggambarkan fenomena secara lebih detil melalui pembuatan kategori konflik tinggi (yang diwarnai merah), konflik medium (yang diwarnai merah muda), konflik rendah (yang diwarnai dengan hijau), tidak konflik manifest (yang diwarnai dengan putih). Kategorisasi ini akan dibuat dalam kluster di tingkat kabupaten/kota secara agregat, maupun dalam kluster di tingkat kecamatan. Sehingga dapat diperoleh gambaran secara mudah tentang dinamika peta konflik di

Yogyakarta dalam kurun waktu 1 tahun ke depan.

Populasi penelitian adalah seluruh stakeholders yang memiliki pengetahuan seputar dinamika konflik social keagamaan yang berkembang di dalam masyarakat, yang terdiri dari birokrat sipil di lingkungan Kantor Urusan Agama yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membangun harmoni social keagamaan.

Dengan jumlah kecamatan sebanyak 78 maka setiap kecamatan diambil sampling secara purposive sebanyak 1 orang responden yang berasal dari unsur birokrasi sipil di Kantor Urusan Agama yang terdiri dari:

1. Kabupaten Sleman sebanyak 17 responden
2. Kabupaten Bantul sebanyak 17 responden
3. Kabupaten Kulon Progo sebanyak 12 responden
4. Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 18 responden
5. Kota Jogjakarta sebanyak 14 reponden

Pembahasan

Sistem Informasi konflik social keagamaan yang dibangun ini, merupakan pengembangan dari software system informasi tentang Indeks Konflik Sosial di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang

mencakup indeks konflik ke dalam 5 kategori besar konflik, sesuai dengan UU No. 7 tahun 2012 tentang Pencegahan Konflik Sosial, yakni Konflik SARA, Konflik Industrial, Konflik Pertanian, Konflik Perbatasan dan Konflik Terorisme. Sistem informasi ini lebih mengembangkan sisi konflik SARA, yakni melacak dinamika konflik social keagamaan, dan lebih khusus dalam organisasi keagamaan berbasis Islam.

Menu yang ditampilkan dalam system informasi ini tentang Indek konflik di tiap kecamatan, kabupaten, dan propinsi, yang didisplaykan dalam grafis polygon batang, lingkaran, dan display peta geografi yang dilinkan dengan google map secara online. Termasuk di dalamnya table perbandingan konflik antar kecamatan, kabupaten, dan sejumlah identifikasi kualitatif terhadap perilaku konflik dengan mempergunakan pendekatan SAT (*structural, accelerator dan trigger*).

Gambar 1

Menu Awal Sistem Informasi



Sumber: Software Sistem Informasi Konflik Keagamaan, 2016. Surwandono all rights reserved

Desain system informasi ini dibangun dengan pendekatan bottom up, di mana data konflik dikumpulkan dari unit social keagamaan yang dikelola oleh Kantor Urusan Agama di kecamatan, yang sekaligus berperan sebagai admin. Untuk menjamin bahwa data yang diinput oleh admin kecamatan dinyatakan valid, maka system informasi ini memberikan syarat data yang dientry dapat diproses oleh system, maka harus mengupload pakta integritas yang ditanda tangani oleh pejabat yang memiliki otoritas.

Sistem informasi membangun indeks konflik social keagamaan berbasis islam dibangun dengan 5 indikator utama, yakni 1. Intensitas konflik, yakni berapa kali kejadian konflik timbul dalam kurun waktu satu tahun. 2. Jumlah orang atau fihak (*parties*), yakni berapa banyak orang yang terlibat dalam konflik. 3. Penggunaan instrumen kekerasan dalam konflik, yakni

instrumen kekerasan apa saja yang dipergunakan, dari kekerasan psikis/verbal sampai kekerasan fisik. 4. Jumlah korban, yakni berapa banyak yang menjadi korban, baik dari korban luka sampai meninggal dunia. 5. Dampak konflik, yakni dampak apa saja yang ditimbulkan dari konflik tersebut, seperti dampak social, ekonomi, politik, budaya. Indikator ini diderivasi dari studi konflik Johan Galtung dalam Transcend Model (Johan Galtung, 2007).

Dari akumulasi data yang terentri kemudian akan diklasifikasi dengan range/interval sebagai berikut:

Tabel 1
Range Indeks Konflik

Range	Derajat
0.1-1.0	Tidak Ada
1.1-2.0	Rendah
2.1-3.0	Sedang
3.1-4.0	Tinggi

Pengelolaan data konflik dibuat secara berjenjang berbasis bottom up, di mana ada admin, medium admin, dan super admin. Admin adalah petugas yang mendapatkan mandate dari organisasi pemerintah untuk memasukan data ke dalam system, di mana hanya punya peran entry dan tidak mendapatkan otoritas untuk melihat hasil display baik dalam bentuk grafik, peta, ataupun informasi kualitatif

perilaku konflik. Medium admin, adalah kepala dinas (organisasi pemerintah) yang mendapatkan otoritas untuk melihat seluruh informasi di kecamatan di tingkat kabupaten/kota yang berada di otoritasnya. Sedangkan super admin adalah kepala dinas yang memiliki otoritas untuk melihat semua data konflik secara lengkap yang berada di propinsi yang menjadi otoritasnya. Sistem bottom up merupakan upaya untuk mendapatkan data yang valid yang dapat mewakili realitas konflik yang berkembang dalam masyarakat.

keputusan yang terkait dengan konflik, system informasi di-link-an dengan google map, yang mana langsung mendapatkan informasi peta wilayah sesuai dengan derajat indeksnya, misal, tanda hijau, bermakna tidak ada konflik (manifest), kuning, bermakna konflik rendah, oranye bermakna konflik medium, dan merah.bermakna konflik tinggi. Pembagian ini dengan menggunakan klasifikasi yang dibuat oleh Emilie Durkheim yakni konflik latent dan konflik manifest. (Durkheim, 2010).

Gambar 2
Display Poligon I

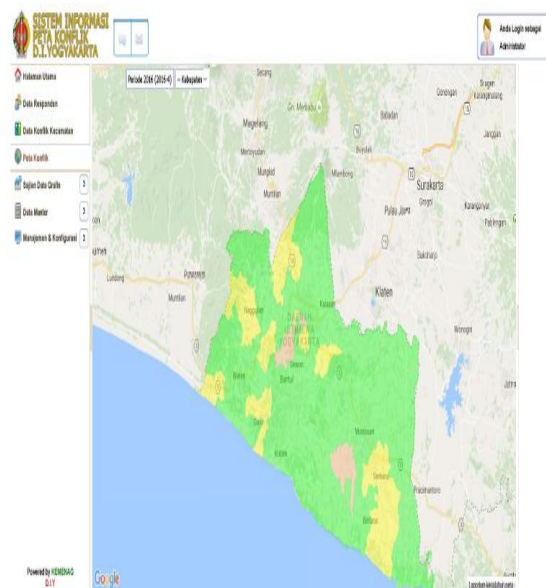


Sumber: Software Sistem Informasi Konflik Keagamaan, 2016. Surwandono all rights reserved

Untuk memudahkan penggunaan system informasi untuk pengambilan

Gambar 3

Peta Index Konflik Berbasis Google Map



Sumber: Software Sistem Informasi Konflik Keagamaan, 2016. Surwandono all rights reserved

Sistem informasi konflik juga memberikan display perbandingan tentang

indeks konflik per kecamatan, sampai dengan per Kabupaten yang memungkinkan pengambil keputusan di tingkat kabupaten dan Propinsi dapat mengambil sejumlah pola-pola konflik yang muncul. Dengan menambah sejumlah analisis indeks literasi, indeks demokrasi, indeks pembangunan manusia, maka software ini akan dapat memberikan penjelasan yang memadai. Misal, mengapa muncul konflik di daerah dengan basis masyarakat perkoataan lebih tinggi dibandingkan dengan basis masyarakat agraris. Dengan bantuan indeks demokrasi, maka penjelasannya menjadi lebih terukur dan memuaskan, berupa konflik dalam masyarakat dengan indeks demokrasi tinggi sebagai bagian dari artikulasi yang dijamin oleh sistem masyarakat, sedangkan perilaku konflik dalam masyarakat agraris diasumsikan sebagai cerminan perilaku menyimpang, anti keamanan dan harmoni sosial. (Maurice Duverger, 2004)

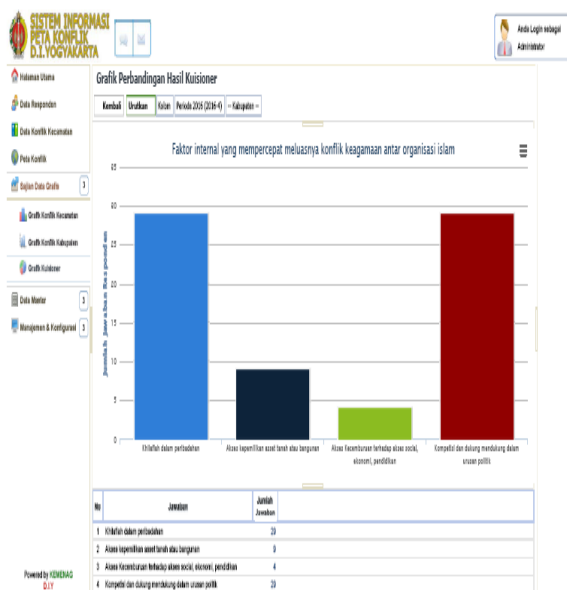
Gambar 4
Perbandingan Indeks Konflik



Sumber: Software Sistem Informasi Konflik Keagamaan, 2016. Surwandono all rights reserved

Software juga dibangun dengan menggunakan model SAT dari Ichsan Malik, dengan mengidentifikasi sejumlah faktor-faktor struktural, akselerator dan triggernya. Dengan menggunakan model SAT tersebut, maka akan dengan mudah dilacak di suatu daerah penyebab konflik struktural apa, akseleratornya apa, dan triggernya apa. Misal dalam melihat eskalasi konflik, maka faktor yang perlu dilacak adalah faktor akselerasinya, yakni faktor yang membuat konflik yang terjadi mengalami perluasan aktor, wilayah, penggunaan instrumen konflik maupun dampaknya.

Gambar 5
Perbandingan Faktor
Yang mempercepat Konflik



Sumber: Software Sistem Informasi Konflik Keagamaan, 2016. Surwandono all rights reserved

Kesimpulan

Sistem informasi konflik yang dikembangkan oleh Magister Politik dan Hubungan Internasional UMY, didesain secara kompak, dengan memadukan pengembangan kerangka teori akademik tentang resolusi konflik, dan dikombinasikan dengan kebutuhan praktis pengelolaan konflik di era demokratisasi. Upaya akademik ini sebagai bagian dari tanggung perguruan tinggi dalam pemberian solusi konseptual dan solusi praktis dalam penyelesaian problem di masyarakat.

Secara praktik, software ini sedang akan dilakukan BIMTEK (bimbingan dan teknis) penggunaan software. Dan masih sangat mungkin dikembangkan lebih jauh, untuk mendokumentasi data konflik, dan mempergunakan data konflik untuk pembuatan keputusan pengelolaan konflik secara efektif dan produktif.

REFERENCES

- Duverger Maurice, 2005, *Sosiologi Politik*, Jakarta, Rajawali Press
- Galtung, Johan, 2014, *Theoy of Conflict: Overcome Direct Violence, UP Transcend*
- J. Craig Jenkins, 2001, "Conflict-Carrying Capacity, Political Crisis, and Reconstruction: A Framework for the Early Warning of Political System Vulnerability, *Journal of Conflict Resolution Vol. 45 No. 1*
- LIN, 2004, *Dinamika Konflik dalam Transisi Demokrasi: Informasi Potensi Konflik dan Potensi Integrasi Bangsa (Nation and Character Building)*, Jakarta, Deputy Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Informasi Nasional
- Malik, Ichsan, 2006, *Manual Pelatihan Pembangunan Perdamaian dan Pencegahan Konflik*, Jakarta, SERAP, 2006
- Robert Trappl (ed.), 2014, *Programming for Peace: Computer Aided Methods for International Conflict Resolution and Prevention*, London, Springer
- Surwandono, (2015), *Peta Elektronik Indeks Konflik Sosial di Propinsi Daerah*

Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta,
MPHI UMY

Surwandono, 2015, *Penyusunan Peta Konflik Sosial di Yogyakarta dengan Menggunakan Sistem Informasi Konflik*, Kesbanlinmas, 2015.

Surwandono, 2016, *Penyusunan Peta Konflik Sosial Keagamaan Islam Berbasis Sistem Informasi*, Kemenag DIY-UMY-LPDP

Surwandono, *Penatalaksanaan early warning systems dalam Pencegahan Konflik Horizontal Pada Pilkada Langsung di Jawa Timur*, Laporan Penelitian Hibah Strategis Nasional, 2009.

AUTOBIOGRAPHY

Dr. Surwandono

Lahir di bantul, 2 Mei 1971.

Menyelesaikan jenjang S-1 di UNAIR (1993), S2 di UGM (1998), dan S3 di UGM (2011), dengan mengambil jurusan Ilmu Politik dan Hubungan Internasional. Saya memiliki pengalaman dalam sejumlah riset dan publikasi tentang resolusi konflik yang diterbitkan dalam sejumlah Jurnal Ilmu Politik FISIPOL UMY, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, UMY, Jurnal Tsaqafiyat UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta, Jurnal Profetik UIN Alaudin Makasar.

Dan sejumlah buku

1. Buku Resolusi Konflik di Dunia Islam, Yogyakarta, Ghalia Ilmu, 2011
2. Menulis Separatisme dan Kekerasan Yogyakarta, CV Komoyojo, 2015
3. Manajemen Negosiasi Dalam Penyelesaian Separatisme, Pustaka Pelajar, 2013

Sekarang sedang menyelesaikan riset

1. Membangun system deteksi dini konflik social di Yogyakarta, DIKTI
2. Pelembagaan pengelolaan konflik social keagamaan di Yogyakarta, LPDP
3. Mendiskusikan deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan pada organisasi mahasiswa berbasis islam

Dr. Surwandono, S.Sos, M.Si adalah anggota asosiasi AIHII (Asosiasi Ilmu Hubungan internasional Indonesia), APPTM (Asosiasi Program Pasca Sarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah), INSIERA (Indonesian Scholar on Islamic Studies in International relations Association), dan APPSA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, "Penggunaan dan Penyalahgunaan Budaya dalam resolusi konflik di Indonesia", *Antropologi Indonesia Vol. 25 No. 66*, 2002
- Gurr, Ted Robert, and Barbara Harff. 1996. *Early warning of communal conflict and genocide*. Tokyo: United Nations University Press
- , and Mark Lichbach. 1986. *Forecasting internal conflict: A competitive evaluation of empirical theories*. *Comparative Political Studies* 19:3-38.
- , 1998, *Minorities at risk*. Washington, DC: U.S. Institute for Peace
- , 1998. *Early warning of ethno-political rebellion: In Preventive measures*, Lanham, MD: Rowman & Littlefield,
- Jenkins, J. Craig , 2001, "Conflict-Carrying Capacity, Political Crisis, and Reconstruction: A Framework for the Early Warning of Political System Vulnerability, *Journal of Conflict Resolution Vol. 45 No. 1*
- Surwandono, 2011, *Resolusi Konflik di Dunia Islam*, Jakarta, Ghalia Ilmu
- , 2013, *Manajemen Konflik Separatisme: Dinamika Konflik dan Negosiasi di Mindanao*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013
- , 2013, *Fiqh Perbedaan Dalam Dunia Kemahasiswaan*, Yogyakarta, NFP
- , 2012, *Statistik Untuk Ilmu Hubungan Internasional*, Yogyakarta, LP3 UMY dan Jurusan Ilmu Hubungan nternasional
- , *Penatalaksanaan Deteksi dini Dalam Pencegahan Konflik Horisontal Pada Pelaksanaan Pilkada Langsung di Jawa Timur*, *Jurnal Sosial dan Ilmu Politik UMY*, 2010
- , Ali Muhammad, 2009, *Penatalaksanaan Deteksi dini Dalam Pelaksanaan Pilkada Langsung* , Laporan Riset Strategis Nasional, 2009
- , dan Ratih Heringtyas, 2009, *Peningkatan Kapasitas Perempuan Sebagai Aktor Resolusi Konflik Etnis di Indonesia*, Laporan Riset Hibah Bersaing Dikti
- , dan Sidiq Ahmadi, 2010-2012, *Pelebagaan Fiqh Perbedaan Dalam Mendiskursuskan Pemikiran Islam Berbasis Liberal dan Fundamental Pada*

Organisasi Ekstra Kampus Berbasis Islam di Yogyakarta, Laporan Riset Hibah Bersaing Dikti

-----, dan Sugito, *Pelmebagaan Nilai Javanese Wisdom Sebagai Nilai Resolusi Konflik Dalam Partai Politik di Yogyakarta, Hibah Bersaing Dikti, 2009.*

-----, *Relasi Konflik dan Geografi Politik di Asia Selatan, UMY, 2004.*

-----, *Relasi Konflik dan Geografi Politik di Asia Tenggara, UMY, 2003,*

-----, *Relasi Konflik dan Geografi Politik di Timur Tengah, UMY, 2002,*

Tim Lembaga Informasi Nasional, 2004, Dinamika Konflik dalam Transisi Demokrasi: Informasi Potensi Konflik dan Potensi Integrasi Bangsa (Nation and Character Building), Jakarta, Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Informasi Nasional

Tunjung Sulaksono, dan Surwandono, *Peningkatan Kapasitas Manajemen Konflik Guru Dalam pencegahan Praktik Bullying Pada SMA di Yogyakarta, Hibah Bersaing Dikti, 2010-2011.*